

# IMPLEMENTASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM

**Hery Agustiawan**

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

**Abstract: Implementation Licences Instead Mineral of Metal.** The purpose of this research is to know and analyze the implementation licences instead of metal and mineral rocks and coal in Siak Regency and the factors that slow him down. This research uses the theory of George C. Edward III that explains the success of the implementation of the policy views of several factors, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research was carried out in Siak Regency, where the informants in this study was the implementor of policies and recipient policies. Where the method of determining the informant used was snowball sampling is a method of determining information sources such as the snowball roller to find the most appropriate source of information in providing a response. In performing the data collection method used observation and interviews to research informants. After the data are collected and then analyzed using descriptive qualitative analysis. The results of this research found the implementation licences instead of metal and mineral rocks and coal in Siak Regency inferred has been running pretty well. While the factors that impede implementation are still there is a contradiction, layered information, incomprehension implementor, budget costs, the attitude of indifference and low participation.

**Abstrak: Implementasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam.** Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis implementasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak dan faktor-faktor yang menghambatnya. Penelitian ini menggunakan teorinya George C. Edward III yang menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari beberapa faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Siak, Dimana yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah implementor kebijakan dan penerima kebijakan. Dimana tehnik penentuan informan yang digunakan adalah *snowball sampling* yaitu sebuah tehnik penentuan sumber informasi seperti bola salju yang mengelinding untuk menemukan sumber informasi yang paling tepat dalam memberikan tanggapan. Dalam melakukan pengumpulan data digunakan metode observasi dan wawancara kepada informan penelitian. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan implementasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak disimpulkan sudah berjalan dengan cukup baik. Sedangkan faktor yang menghambat implementasi adalah masih ada pertentangan, informasi yang berlapis, ketidakpaham implementor, anggaran biaya, sikap ketidakpedulian dan rendahnya partisipasi.

**Kata Kunci:** implementasi, izin usaha, perda

## PENDAHULUAN

Perkembangan otonomi daerah telah membawa sejumlah implikasi terhadap perubahan fungsi-fungsi pemerintah daerah dalam berbagai kebijakan, baik dalam kelembagaan, pemanfaatan dan penggalian sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber kegiatan ekonomi di berbagai bidang. Pemerintah daerah harus dapat menggali seluruh potensi yang ada di dalam pengelolaan keuangan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan lainnya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan sehingga diharapkan daerah dapat berkembang secara mandiri.

Upaya merespon amanah yang disampaikan melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2004, beberapa pemerintah daerah berusaha untuk menyusun arah kebijakannya yang bersinergi dengan amanah otonomi daerah yang disampaikan melalui undang-undang tersebut. Salah satu daerah itu adalah Kabupaten Siak, yang berkomitmen untuk menyusun kebijakan daerahnya dalam upaya mengakomodir seluruh kebutuhan dan potensi daerah. Kabupaten Siak memiliki potensi pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara. Dalam upaya menggali potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak menerbitkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun

2010 tentang izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara. Maksud dari penerbitan peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dalam rangka memberikan pelayanan yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara. Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan potensi pertambangan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan mencegah dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 tentang izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara dibutuhkan petunjuk umum dan teknis yang jelas. Supaya dalam mengimplementasikan, pihak implementor tidak salah untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada kelompok sasarannya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Siak memperjelas implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 tentang izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara dengan menerbitkan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2013 tentang tata cara dan prosedur penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara dan pertambangan rakyat di Kabupaten Siak.

Dengan sudah diaturnya jenis izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak, diharapkan setiap individu dan kelompok usaha bisa memanfaatkannya untuk melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebab penerbitan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2013 dimaksudkan agar setiap individu dalam pelaku usaha bisa melakukan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara melalui izin usaha pertambangan eksplorasi, izin usaha pertambangan operasi produksi dan izin pertambangan rakyat. Penerbitan peraturan ini juga dimaksudkan supaya tidak lagi muncul penambangan-penambangan liar yang dilakukan oleh pelaku usaha ataupun masyarakat terhadap mineral logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak. Oleh karena itu dengan

terbitnya peraturan ini dan diimplementasikan, diharapkan tidak ada lagi muncul penambangan liar terhadap mineral logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak.

Berkenaan dengan data yang ada, luas daerah potensi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Siak seluas 34 ha dan dari 13 jumlah badan/usaha yang melaksanakan aktivitas pertambangan hanya satu perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan dan satu perusahaan yang mendapatkan rekomendasi izin.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2004). Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Pemerintah sebagai pelaku utama implementasi kebijakan publik memiliki dua fungsi yang berbeda yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan fungsi administrasi terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan publik memiliki kekuatan diskretif (*discretionary power*) dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, aktor-aktor lain juga harus memainkan peran pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis implementasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak dan faktor-faktor yang menghambatnya.

## METODE

Pelaksanaan penelitian ini untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, terutama digunakan untuk menggambarkan (*deskriptif*) dan menjelaskan (*explanatory* atau *confirmatory*) tentang fenomena yang ditemukan dan permasalahan penelitian yang dirumuskan. Adapun yang menjadi alasan pemilihan metode kualitatif adalah keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan rencana pada masa yang akan datang. Melalui wawancara dan observasi diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan bagaimana implementasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam

Implementasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak masih berjalan belum maksimal. Karena ditinjau dari jenis-jenis izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak yang diizinkan hanya ada satu jenis izin usaha yang berhasil diterbitkan yaitu izin usaha pemanfaatan atau pengambilan tanah timbun dari perbukitan. Fakta ini menjelaskan bahwa implementasi izin usaha yang dilakukan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan serta batubara masih sangat minimal sekali. Proses implementasi yang dilakukan terkendala oleh kurang baiknya koordinasi dan sinergitas yang dilakukan oleh instansi yang terlibat dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara.

Ketidakmampuan instansi terkait untuk berkoordinasi dan bersinergi dalam melakukan penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara membuat izin usaha yang diterbitkan masih sangat minimal. Untuk itu kedepannya dalam upaya memper-

mudah penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak, pemerintah harus memangkas beberapa prosedur perizinan dan mengurangi banyaknya keterlibatan instansi untuk implementasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara. Atau dengan membentuk tim penerbitan perizinan yang bersinergi didalam satu tempat kerja, sehingga pengurusan rekomendasi yang dibutuhkan dapat berjalan dengan lancar dan mempermudah penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara.

### Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam

Implementasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak disimpulkan sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya dalam implementasi yang bersifat *top down*, pihak implementor sudah cukup mampu mengkomunikasikan kebijakan dengan baik, cukup mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam implementasi, cukup mampu mendiposisikan kebijakan dalam proses implementasi dan cukup mampu menetapkan struktur birokrasi yang akan bertugas dalam implementasi kebijakan. Komunikasi yang terjalin tidak terlepas dari kemampuan implementor untuk menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikan, dimana proses penyampaian informasi kebijakan berawal dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Kemudian sumber daya dalam implementasi kebijakan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak juga menjadi hal yang penting. Karena para pelaksana kebijakan akan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang berhasil, tetapi apabila pelaksana kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Oleh karena itu perlu dilakukan penyediaan sumber daya yang berkualitas dalam upaya merealisasikan tujuan dan sasaran kebijakan yang ditetapkan, termasuk

salah satu sumber daya yang penting adalah SDM pelaksana dan anggaran kebijakan yang disediakan.

Selanjutnya disposisi atau sikap pelaksana yang ditunjukkan dalam implementasi kebijakan kebijakan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak cukup mendukung proses pemberian pelayanan perizinan. Dimana dalam menunjukkan sikapnya, para implementor sudah berusaha untuk memahami isi kebijakan yang ditetapkan dan berusaha merespon setiap keluhan yang disampaikan oleh para pemohon. Selain itu juga struktur birokrasi yang disiapkan untuk mendukung implementasi kebijakan kebijakan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak juga cukup mendukung. Persiapan yang dilakukan dengan menyusun SOP pelayanan perizinan dan adanya koordinasi dengan dinas terkait yang terlibat dalam proses pelayanan perizinan.

## SIMPULAN

Implementasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak masih berjalan belum maksimal. Karena ditinjau dari jenis-jenis izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak yang diizinkan hanya ada satu jenis izin usaha yang berhasil diterbitkan, yaitu izin usaha pemanfaatan atau pengambilan tanah timbun dari perbukitan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara di Kabupaten Siak disimpulkan sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya dalam implementasi yang bersifat *top down*, pihak implementor sudah cukup mampu mengkomunikasikan kebijakan dengan baik, cukup mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam implementasi, cukup mampu mendisposisikan kebijakan dalam proses imple-

mentasi dan cukup mampu menetapkan struktur birokrasi yang akan bertugas.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abidin Said Zainal, 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Curah
- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Bintoro, 1992. *Strategi Pemberdayaan Daerah dalam Konteks Otonomi*. Yogyakarta: Philosophy Press
- Budiman Nashir, 2001. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Rajawali
- Dunn N. William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Dye, Thomas R., 1981. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs Practice Hall inc.
- Grindle, 1980. *Policy Content and Context in Implementation Princeton*. New Jersey: University Press
- Hassel Nogi, 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung & Co
- Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Santoso, 1998. *Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Subarsono, 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sujianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Sumaryadi, Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- Wahab, Solihin Abdul. 1997. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.